

**IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR
014 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA
BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Esyca Sonti Nainggolan, Heryono Susilo Utomo, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 10, Nomor 1, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 014
Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Esyca Sonti Nainggolan

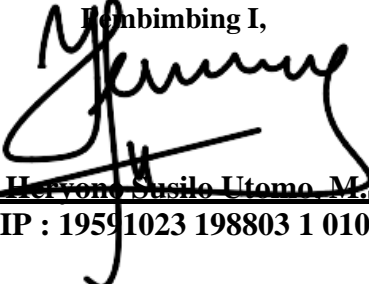
NIM : 1502015024

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Samarinda, 30 Agustus 2022

Pembimbing I,

Dr. Herono Susilo Utomo, M.Si
NIP : 19591023 198803 1 010

Pembimbing II,

Dr. Sandi Rande, M.Si
NIP : 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 10	  <u>Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si</u> NIP. 19830414 200501 2 003
Nomor : 1	
Tahun : 2022	
Halaman : 6003-6016 (Ganjil)	

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR 014 DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Esyca Sonti Nainggolan¹, Heryono Susilo Utomo², Santi Rande³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, serta faktor yang menghambat dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penelitian ini key informan adalah Kepala Sekolah SDN 014 dan sebagai informan adalah guru dan siswa-siswi di SDN 014 Desa Kedang Murung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka (library research), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara masih adanya permasalahan yang dihadapi yaitu dalam hal kegiatan sosialisasi atau pemberian informasi mengenai indikator-indikator implementasi kurikulum 2013 sehingga masih ada keluhan dari para guru-guru dalam menjalankan tugasnya. Kemudian mengenai sumber daya juga masih belum sesuai dengan prosedur yang ada, dimana untuk jumlah pegawai memang sudah cukup memadai namun untuk kualifikasi dari pegawai masih dinilai kurang. Meskipun latar belakang pendidikan para pelaksana sudah sesuai dengan jurusannya, namun masih banyak guru-guru yang mengalami kesulitan dalam melakukan format penilaian ataupun pengisian rapor peserta didik hal ini dikarenakan lemahnya pengetahuan guru dalam mengoperasikan alat teknologi sehingga perlu ditingkatkan penggarapan dan pelatihan mengenai program kurikulum 2013 agar bisa berjalan dengan semestinya dan tercapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Implementasi, Kurikulum 2013, Kebijakan Publik.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sontinainggolan1997@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, menjelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum di Indonesia sejak jaman kemerdekaan sampai sekarang mengalami banyak perubahan.

Serangkaian persoalan pendidikan yang masih mengganjal dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah belum adanya sistem pembelajaran yang dinilai tepat untuk menjawab cita-cita pendidikan selama ini, hal ini dibuktikan dengan sederet pergantian kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun. Kurikulum merupakan bidang yang sulit untuk dipahami, tetapi sangat terbuka untuk didiskusikan. Perubahan kurikulum dalam pendidikan nasional Indonesia tercatat sejak tahun 1945 telah mengalami 10 kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, hingga yang disusul dengan kurikulum terbaru yakni Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 ini adalah pengganti Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, serta aspek sikap dan perilaku. Didalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, dan sebagainya, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika.

Berikut perbedaan yang mendasar dalam perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 diantaranya adalah perubahan pola pikir, bahwa kurikulum 2013 mengedepankan pola pikir ilmiah (*Scientific Approach*), dalam pembelajaran siswa di ajak untuk mengaktifkan aktifitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring. Perubahan lainnya adalah pendalaman materi dan perluasannya diserahkan sepenuhnya kepada tenaga pendidik, sesuai dengan yang dibutuhkan dimana siswa diarahkan ke ranah aplikasi dari pengetahuan yang diajarkan, tidak hanya dihafal atau dicerna secara kognitif semata. perubahan lainnya adalah ditingkat proses pembelajaran penyesuaian beban yang tidak memberatkan kepada peserta didik. Dalam kurikulum 2013 diharapkan menyentuh ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan penilaian proses hasil belajar yang menggunakan penilaian autentik (*Authentic Assessment*) yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan tersebut.

Pendek kata, secara konseptual kurikulum 2013 jelas ada perubahan signifikan. Namun bagaimanapun akan dikembalikan kepada kemampuan tenaga pendidik dalam mengaplikasikan kurikulum yang ada. kurikulum sebaik apapun “di tangan” tenaga pendidik yang tidak ahlinya maka hasilnya tidaklah

signifikan. Sampai saat ini, banyak sekolah yang belum mengerti dan tahu dengan pasti apakah di tahun 2014 ini akan menggunakan kurikulum 2013 secara maksimal, karena minimnya sosialisasi kurikulum yang memang masih terbilang paling baru itu.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang dibuat oleh pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Banyak wacana pro dan kontra dalam pengimplementasian kurikulum 2013 dimana salah satunya adalah kurangnya kesiapan setiap sekolah dalam menjalankan program kurikulum 2013.

Menurut Gultom (2013:1), pengembangan kurikulum 2006(KTSP) menjadi kurikulum 2013 dikarenakan pada kurikulum 2006 (KTSP) masih banyak kekurangan antara lain : (1) Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; (2) Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (3) Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan) belum terakomodasi didalam kurikulum; (4) Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang mulai melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun 2014 hingga sekarang, saat ini terdapat 18 kecamatan yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 yaitu, Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Samboja, Sanga-Sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong dan Tenggarong Seberang.

Program Kurikulum 2013 dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. Kurikulum 2013 sudah dilakukan disemua Sekolah Dasar, salah satu sekolah dasar yang melaksanakan Kurikulum 2013 adalah SD 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun. Tetapi pada pelaksanaan program Kurikulum 2013, Desa Kedang Murung juga terdapat banyak kendala dan banyak prosedur yang tidak sesuai dengan indikator keberhasilan Program Kurikulum 2013. Maka dari itu perlu dianalisa bagaimana SD 014 dalam melaksanakan Kurikulum 2013, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi SD 014 untuk menerapkan Kurikulum 2013.

Penelitian ini dilakukan di SD 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara karena di SD 014 Desa Kedang Murung visi dan misi serta tujuan SD 014 belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi,

dikarenakan sekolah yang sudah melaksanakan implementasi Kurikulum 2013 sejak tahun 2017 ini masih mengalami beberapa kendala dalam pengimplementasiannya.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan di SD 014 terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 seperti :

1. Kendala terkait komunikasi, yaitu terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi program kurikulum 2013 secara konsisten dan jelas yang terdapat pada penjelasan diatas mengenai indikator program kurikulum 2013 sehingga masih ada pegawai yang belum memahami mengenai kurikulum 2013 khususnya dalam hal format penilaian peserta didik.
2. Kendala terkait sumber daya, yaitu masih banyak pegawai yang kurang berkompentensi yang belum menguasai atau masih lemah dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer sehingga harus dilakukan pendampingan dan pelatihan.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Seperti kata Bridgman dan Davis (2005:3) kebijakan publik padaumumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*” Artinya, kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Urusan-urusan yang menyangkut kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah sakit, perumahan rakyat, lembaga-lembaga rehabilitas sosial adalah beberapa contoh yang termasuk dalam bidang kebijakan publik.

Selanjutnya Hogwood dan Gunn (dalam Soewarno 2003:5) secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Adapun menurut Dewey (dalam Nawawi 2009:8) kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan disusun (*constructed*) dan didefinisikan serta bagaimana ke semua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas mengenai kebijakan publik, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat dan ditetapkan oleh aparaturnegara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi (Pelaksanaan) Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaksanaan diartikan sebagai penggerak suatu keberhasilan dalam menanggulangi segala persoalan yang ada untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin yang sudah direncanakan untuk dapat menjadikan suatu rencana itu bisa digerakkan atau memberikan hasil yang maksimal. Nurdin (2002:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Kemudian Guntur (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi efektif. Selanjutnya Hanifah (2002:67) mengenai implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi yang merupakan pengembangan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2004:68) yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan /mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Pendidikan

Pendidikan menurut Langeveld dalam Hasbullah (2005:2) adalah setiap usaha pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan anak tertuju kepada pengawasan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup bagus dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Kemudian menurut Marimba (dalam Hasbullah, 2005:3) pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh

tenaga pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik terbentuknya kepribadian yang utama.

Dalam pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sadar, terencana, serta berkesinambungan untuk menciptakan kepribadian yang mandiri serta bertujuan yang jelas dan untuk mencapai tingkat hidup atau kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Guru

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 poin 1, Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Imran juga mengemukakan pengertian guru dalam penelitiannya. Menurut Imran (2010:23), guru atau tenaga pendidik dapat disebut sebagai orang yang mempunyai jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, sampai menengah.

Dari beberapa pengertian mengenai tenaga pendidik atau guru diatas dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk menjalankan profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya yaitu untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, hingga menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa dalam segala aspek.

Program Kurikulum 2013

Secara *etimologi* istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Dimana pada mulanya istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis star sampai dengan finis untuk memperoleh medali atau penghargaan.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Implementasi kebijakan program kurikulum adalah pengimplementasian atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap

sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan, karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya.

Program Kurikulum 2013 bukanlah merupakan hal yang baru, akan tetapi kurikulum 2013 adalah kurikulum yang merupakan rujukan atau perubahan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi, antara lain hendak mengubah pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi ke pendidikan sebagai proses, melalui pendekatan tematik integratif *dengan contextual teaching and learning (CTL)*. Maka dari itu, pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik atau murid-murid agar mereka mampu berkreasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali berbagai potensi secara ilmiah. Dalam program kebijakan inilah perlunya kreatifitas guru, agar mereka mampu menjadi fasilitator, dan mitra belajar bagi peserta didik. Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, akan tetapi harus juga kreatif dalam memberikan pelayanan dan kemudahan belajar (*facilitate learning*) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat mencerna dengan baik dan belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang untuk menjadi generasi bangsa yang kreatif siap beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan (Mulyasa, 2013:42).

Perubahan kurikulum ini tentu saja sudah melewati tahap-tahap yang semestinya seperti tahap perumusan masalah, tahap agenda setting, tahap formulasi kebijakan, tahap legitimasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Dan tiga aspek yang menjadi landasan pengembangan kurikulum secara jelas terangkum dalam isi materi uji kurikulum antara lain :

1. Landasan Filosofis Kurikulum 2013
2. Landasan Yuridis dan Empiris Kurikulum 2013
3. Aspek Konseptual

Jika melihat dari ketiga aspek ini maka kita dapat melihat dan juga menilai bahwasannya apakah pergantian kurikulum ini telah memang dirasakan perlu dengan kondisi riil di lingkungan kita masing-masing disetiap satuan pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, yang meliputi :
 - a. Komunikasi
 - b. Ketersediaan Sumber Daya
 - c. Sikap/kecenderungan para pelaksana (disposisi)
 - d. Struktur Birokrasi

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun data primer yaitu data yang diperoleh melalui nara sumber dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti seperti wawancara dan observasi sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi berupa, dokumen-dokumen dan buku-buku ilmiah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ada 4 (empat), yaitu: tinjauan pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yaitu kegiatan analisis yang terbagi pada beberapa bagian diantaranya: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan pemerintah atau pihak pelaksana kebijakan setelah kebijakan tersebut dibuat dan ditetapkan berdasarkan Undang-undang dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Meter dan Horn dalam Pramono (2020; 3) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pramono (2020;2) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang dan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka ada dua pilihan yaitu langsung implementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

Pembahasan pada penelitian dalam Implementasi Program Kurikulum 2013 di SDN 014 Kota Bangun dapat dipahami sebagai pelaksanaan atau penerapan

program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari program kurikulum 2013 yang memfokuskan pembahasan berdasarkan variabel dari model Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen, dan struktur birokrasi yang ada.

Komunikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat didefinisikan bahwa implementor sudah melaksanakan sosialisasi penyampaian informasi terkait Program Kurikulum 2013, tetapi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kondisi pandemi yang membuat banyak sekolah melakukan pembelahan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Sehingga masih ada pendidik yang belum memahami sistem Kurikulum 2013.

Menurut Edward III 9 dalam Agustino, (2016;1370) komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Kemudian jika dikaitkan dengan pendapat Edward III (dalam Agustino, 2016; 137) tentang komunikasi, berdasarkan hasil penelitian dikatakan belum berhasil. Dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik, dikarenakan adanya pembelahan pembelajaran secara daring sehingga membuat para pelaksana tidak dapat melakukan sosialisasi secara langsung. Kemudian dikaitkan dengan variabel keberhasilan dalam komunikasi, pertama variabel transmisi, penyaluran sosialisasi tentang Program Kurikulum 2013 yang dilaksanakan tapi belum maksimal, kemudian yang kedua adalah variabel kejelasan, yaitu informasi terkait sosialisasi program kurikulum 2013 belum jelas dikarenakan masih ada guru yang belum memahami standar penilaian terhadap peserta didik. Yang terakhir adalah variabel konsistensi, para pelaksana program kurikulum 2013 belum menyampaikan informasi pada sosialisasi secara konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Jadi hasil penelitian terkait program kebijakan kurikulum 2013 di sekolah dasar 014 Kota Bangun belum sepenuhnya selaras dengan pendapat Edward III tentang komunikasi beserta variabel-variabel keberhasilannya.

Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini tidak hanya mencakup pada sumber dayamanusia melainkan juga mencakup pada kemampuan dari sumber daya manusia untuk dapat mengimplementasikan program kurikulum 2013. Hal ini menjelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan memberikan hasil kinerja dalma implementasian kebijakan yang tepat dan efektif.

Sumber daya adalah pendukung dan unsur yang utama dalam setiap organisasi yang bertujuan agar unsur tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian dalam tujuan implementasi program kurikulum 2013. Perintah dalam implementasi kebijakan harus dilaksanakan secara jelas dan mendukung namun jika pelaksana kekurangan sumber daya sesuai dengan yang diharapkan dalam melaksanakan program kebijakan maka implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan tidak efektif.

Sumber daya yang perlu menjadi perhatian adalah staf yang tepat dan memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Sekolah Dasar 014 Kota Bangun yang dimana unsur pelaksanaan teknis program kurikulum 2013 dibantu oleh Dinas Pendidikan yang berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa pada setiap sekolah yang berada dalam naungan Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Bangun memiliki staf atau pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan profesi tersebut sehingga dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dapat berjalan dengan semestinya.

Disposisi

Disposisi merupakan variabel ketiga dari model Implementasi menurut Edward III dimana dalam proses implementasi yang memiliki konsekuensi yang kuat dalam penerapan program kebijakan dengan tujuan supaya pelaksanaan dapat berjalan secara maksimal. Jika dalam implementasi kebijakan ingin berjalan secara efektif maka implementor perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan dalam melaksanakannya tetapi juga wajib memiliki rasa keinginan dan sikap yang positif dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pada hal ini Sekolah Dasar 014 Kota Bangun seperti yang telah disampaikan oleh *informan* bahwa implementor telah memiliki hal tersebut dan juga mengaktualisasikan dalam program kurikulum 2013 tersebut.

Edward III dalam Dwiyanto (2009; 31) mengungkapkan bahwa disposisi berkenaan pada sikap dan ketersediaan serta komitmen yang perlu dimiliki oleh para implementor dalam implementasi kebijakan untuk dapat mencapai tujuan secara efektif. Ketika para pelaksana mempunyai pemikiran atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan kebijakan juga tidak terlaksana secara maksimal.

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi merupakan pengetahuan, karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh implementor maka dapat membantu proses pelaksanaan implementasi dengan baik, serta memiliki sikap disiplin dan pemahaman tentang kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga dapat membantu terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena dapat menentukan apakah masyarakat menerima dengan baik kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dan ditunjang dengan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan program kurikulum 2013 di SDN 014 Kota Bangun telah terlaksana sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Stafpelaksana program kurikulum 2013 menerima dengan positif kebijakan yang diberikan dan diaktualisasikan dengan setiap individu-individu staf pelaksana program kurikulum 2013 menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga setiap kebijakan yang diberikan oleh atasan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir menurut model Edward III yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa kebijakan ini tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Konsepsi tentang struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau tata aliran program yang mampu mendukung penerapan kebijakan, sehingga dapat tercapai program yang telah ditentukan sebelumnya melalui prosedur yang ada.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, salah satunya adanya *standart operating procedure* (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melaksanakan suatu program, struktur birokrasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menyebabkan aktivitas kebijakan tidak fleksibel.

Dalam pelaksanaan suatu program untuk mencapai hasil yang diinginkan harus mendapatkan dukungan dari setiap orang yang terlibat didalamnya. Demikian halnya dalam pelaksanaan program kurikulum 2013 oleh SDN 014 Kota Bangun yang dimana setiap staf pegawai memiliki tugas dan wewenang masing-masing untuk menyukseskan implementasi program kurikulum 2013 dengan mengikuti *standart operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan

Faktor penghambat Kurikulum 2013 di SDN 014 Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan dari program yang dipilih dan ditetapkan sebagaimana direncanakan. Namun dalam hal ini, tidak semua program yang diimplementasikan benar-benar berlangsung dengan mulus dan efektif. Kegagalan implementasi mungkin saja terjadi, tetapi dengan mengetahui sebab, berarti dapat memberi penjelasan tentang solusi penyelesaiannya. Titik temu dari kegagalan tersebut, yang penting mengenai bagaimana cara mengatasinya dan implementasinya dapat dikembangkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis secara langsung maupun daring di Sekolah Dasar 014 Kota Bangun, bahwa pelaksanaan program kurikulum 2013 terdapat hambatan yang terjadi pada beberapa sumber variabel dalam implementasi yaitu;

1. Komunikasi, yaitu terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi program kurikulum 2013 secara konsisten dan jelas yang terdapat pada penjelasandiatas mengenai indikator program kurikulum 2013 sehingga masih ada pegawai yang belum memahami mengenai kurikulum 2013 khususnya dalam hal format penilaian peserta didik.
2. Sumber daya, yaitu masih banyak pegawai yang kurang berkompentensi yang belum menguasai atau masih lemah dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer sehingga harus dilakukan pendampingan dan pelatihan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh banyak faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terkait dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan model implementasi menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, dan disposisi, serta struktur birokrasi. Adapun penjelasan dalam keempat variabel tersebut dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Komunikasi, yang telah dilakukan dalam internal Sekolah Dasar 014 Kota Bangun dapat dikatakan telah efektif dan sesuai dengan pedoman program kurikulum 2013 dan komunikasi secara eksternal dengan sekolah lainnya dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif dikarenakan adanya beberapa kendala yang menjadikan guru-guru kurang mendapat informasi mengenai kurikulum 2013 sehingga masih ada guru yang belum memahami program tersebut salah satunya adalah mengenai format penilaian terhadap peserta didik.
 - b. Sumber daya, dapat dikatakan sudah memadai secara jumlah, namun belum memadai untuk kemampuan dan kompetensi pengajar. Dimana pada setiap pegawai dalam program kurikulum 2013 telah memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan latar pendidikan, namun dalam hal penggunaan alat teknologi masih banyak guru yang belum memahaminya sehingga guru-guru yang lebih muda masih mendampingi dan memberikan pelatihan.
 - c. Disposisi, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka didapatkan hasil bahwa sikap pelaksana di SDN 014 Kota Bangun telah sesuai dengan tujuan program kurikulum 2013 sehingga dalam

pelaksanaan implementasi program kurikulum 2013 para pelaksana telah mengetahui dengan benar tujuan dari pada program kurikulum 2013 yang berdampak pada kemudahan pelaksana dalam berkoordinasi dan edukasi pada pihak internal SDN 014 Kota Bangun maupun pihak eksternal terhadap sekolah lainnya.

- d. Struktur birokrasi, dalam implementasi program kurikulum 2013 di SDN 014 Kota Bangun dapat dikatakan telah mendukung dalam implementasi kebijakan. Adapun struktur kerja tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi pada setiap bidang yang telah ditentukan di SDN 014 Kota Bangun dalam mencapai tujuan dari program kurikulum 2013.
2. Faktor penghambat implementasi program kurikulum 2013 diketahui terdapat beberapa hambatan berdasarkan variabelnya, hambatan tersebut antara lain;
 - a. Dalam variabel komunikasi, masih mendapatkan kendala dalam hal pelaksanaan sosialisasi atau transmisi informasi mengenai indikator-indikator kurikulum 2013 dikarenakan sejak tahun ajaran 2020/2021 mengalami kondisi pandemi yang membuat banyak sekolah melakukan pembelahan atau menggunakan sistem daring, sehingga masih banyak pelaksana kebijakan kurikulum 2013 ini yang belum memahami sepenuhnya mengenai pengimplementasiannya, salah satu contoh yaitu, guru-guru masih kesulitan dalam hal penilaian terhadap muridnya dikarenakan sistem penilaian yang dianggap cukup rumit sehingga membuat kebijakan kurikulum 2013 di SDN 014 Kota Bangun belum berjalan dengan efektif.
 - b. Dalam variabel sumberdaya, mengenai sumberdaya SDN 014 Kota Bangun masih mendapatkan kendala dimana keterbatasan kompetensi atau kualifikasi guru masih dianggap lemah dikarenakan masih banyak guru yang usianya 55 tahun keatas sehingga masih lemah dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer. Sehingga guru lainnya harus mendampingi dan memberikan pelatihan. Selain itu SDN 014 Kota Bangun juga mendapatkan kendala terhadap sarana dan prasarana yang kurang lengkap seperti contoh keterlambatan pemberian buku pelajaran tematik guru dan siswa-siswi sehingga harus menggunakan buku KTSP sebelumnya namun tetap menggunakan metode kurikulum 2013 sehingga menjadikan tujuan dari kurikulum 2013 belum terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Saran

1. Terkait dengan komunikasi sebaiknya meningkatkan dan memulai kembali pelaksanaan sosialisasi untuk menerapkan program kurikulum 2013 dengan

menjelaskan secara rinci mengenai indikator-indikator kurikulum 2013 kepada pihak guru-guru dan sekolah lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian meningkatkan pemberian edukasi program kurikulum 2013 melalui media-media sosial yang ada baik dari facebook, instagram, maupun youtube.

2. Terkait dengan sumber daya manusia yang belum memadai dalam hal kualifikasi sebaiknya pihak sekolah selalu memberikan perhatian khusus, mendampingi sampai guru bisa meningkatkan kompetensinya, dan selalu memberikan pelatihan secara terus menerus. Dan untuk para pelaksana program kurikulum 2013 khususnya di SDN 014 Kota Bangun lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program kurikulum 2013 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Para pelaksana diharapkan untuk tetap saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang menyangkut kurikulum 2013.

Daftar Pustaka

- Bridgman, P dan Davis. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hanifah. 2002. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imran.(2010). *Pembinaan Guru Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Mulyasa, E. 2015. *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Kebijakan publik, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Setiawan, Guntur.2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Yogyakarta: IRE.
- Soewarno. 2003. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.